KR-Effy Widjono Putro

JALAN DITUTUP: Sejumlah petugas gabungan dari beberapa instansi berjaga di kawasan Tugu yang ditutup aksesnya menuju Jalan Margo Utomo, Yogyakarta, Selasa (6/7) malam. Kawasan Tugu hingga Titik Nol Kilometer ditutup pada malam hari guna mengurangi aktivitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan penyebaran Covid-19.

HARI KETIGA PPKM DARURAT

Mobilitas di DIY Turun 15 Persen

YOGYA (KR) - Hari ketiga pelaksanaan PPKM Darurat, tingkat mobiltas masyarakat di wilayah DIY cenderung menurun 13 persen sampai 15 persen. Penurunan mobilitas tersebut diharapkan ke depan bisa terus meningkat sehingga target dari PPKM Darurat bisa benar-benar tercapai. Karena hanya dengan menurunkan jumlah mobilitas, adanya penularan diharapkan bisa ditekan.

"Selama tiga hari setelah pelaksanaan PPKM Darurat, pemerintah pusat menilai tingkat mobiltas masyarakat di DIY cenderung menurun 13 persen sampai 15 persen. Paling banyak penurunan mobilitas itu ada di Gunungkidul penurunannya cukup bagus. Memang target dari PPKM Darurat adalah menekan jumlah mobilitas penduduk untuk mengantisipasi adanya penularan kasus," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji, seusai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan secara daring dari Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Selasa (6/7).

Dalam kesempatan itu Sultan menyampaikan, kenaikan kasus positif selama pelaksanaan PPKM Darurat cenderung fluktuatif. Kenaikan tertinggi ada pada Minggu (4/7) sebanyak 1.615 kasus, sementara pada masa awal, Sabtu (3/7) sebanyak 1.358 dan hari ketiga, Senin (5/7) sebanyak 1.465 kasus. Adapun untuk menyoroti jumlah kasus meninggal di DIY selama 3 hari pelaksanaan PPKM. Pada Sabtu (3/7), jumlah yang meninggal ada 36, selanjutnya, Minggu (4/7) ada 38, dan hari ketiga, Senin (5/7) turun menjadi 32.

Angka kasus harian terkonfirmasi Covid-19 masih mencatatkan penambahan signifikan mencapai 1.386 kasus sehingga jumlah totalnya menjadi 68.100 kasus di DIY pada Selasa (6/7). Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY pun melaporkan kasus sembuh di DIY bertambah signifikan sebanyak 779 kasus maka total kasus kesembuhan menjadi 51.601 kasus. **(Ria/Ira)-f**

DESA DIMINTA UMUMKAN DAFTAR PENERIMA BANSOS

Muhadjir: Yang Nyeleweng Biar Ketahuan

JAKARTA (KR) - Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021 juga diikuti penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang rentan terkena dampak ekonomi. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar penyaluran bansos dipercepat guna mendukung perekonomian masyarakat di tengah masa PPKM Darurat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, saat ini Pemerintah telah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak, termasuk keluarga-keluarga miskin baru.

"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. Sedangkan yang untuk PT Pos juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat," ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa (6/7).

Menko PMK optimis penyaluran bansos pada masa PPKM Darurat kali ini akan berjalan lebih baik daripada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat tahun lalu. Hal itu dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu. "Insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapi, lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," katanya.

Muhadjir juga menekankan partisipasi masyarakat dari pihak RT dan RW agar ikut serta dalam kontrol penyaluran. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada penyelewengan. Contohnya, pengendalian yang dapat dilakukan seperti memampang nama-nama penerima bansos di balai/kantor desa agar transparan dan setiap orang bisa tahu siapa saja yang sudah menerima bantuan.

"Misalnya pembagian bansos baik melalui Kemensos dan BLT Dana Desa sebaiknya masing-masing desa pasang pengumuman siapa yang telah terima di gardu-gardu kantor/balai desa biar semua orang lihat kalau nanti ada kepala desa atau pamong yang nyeleweng biar ketahuan," tuturnya.

Ia berkaca pada penyaluran bansos tahun lalu, dimana penyalurannya hanya melalui data yang dihimpun melalui RT, RW dan musyawarah desa tanpa verifikasi tingkat kabupaten/kota. Meskipun tahun lalu, aku Muhadjir, banyak kasus data KPM ganda, tumpang tindih, dan salah sasaran, tetapi penyaluran itu semata-mata ditujukan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. "Nah untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan, kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," cetusnya.

Muhadjir mengatakan, untuk saat ini langkah yang diperlukan adalah pengendalian dalam penyaluran BST. Pengendalian dimaksudkan agar dana yang disalurkan Pemerintah tidak hanya terendap di rekening penerima, tetapi agar bisa dibelanjakan untuk menghidupkan roda perekonomian. **(Ati)-d**

BANDARA ADISUTJIPTO

Siapkan Sentra Vaksinasi

YOGYA (KR) - PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto Yogyakarta membuka Sentra Vaksinasi Covid-19 bagi calon penumpang perjalanan udara di Bandara Adisutjipto. Sentra vaksinasi ini bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman serta komunitas bandara lainnya.

Layanan vaksinasi di Bandara Adisutjipto berlokasi di Gedung EMPU sisi Timur bandara berdekatan dengan fasilitas rapid test antigen. Pelayanan setiap hari pukul 09.00-12.00 WIB menggunakan vaksin Sinovac.

"Penyediaan layanan vaksinasi di bandara ini merupakan bentuk dukungan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam mewujudkan target 1 juta vaksin perhari pada Juli dan 2 juta vaksin perhari pada Agustus 2021. Diharapkan dengan adanya sentra vaksinasi di bandara ini akan memperluas dan mempermudah masyarakat, khususnya calon penumpang, untuk mendapatkan vaksin Covid-19, sehingga *herd immunity* dapat segera terwujud," jelas General Manager Bandara Adisutjipto Yogyakarta Agus Pandu Purnama saat membuka sentra vaksinasi, Selasa (6/7).

Proses dan prosedur vaksinasi di bandara diperkirakan memerlukan waktu sekitar 33 menit perorang. Dimulai pendaftaran, vaksinasi dan observasi.

Penyediaan sentra vaksinasi di bandara ini juga untuk mendukung penerapan persyaratan protokol kesehatan pada masa PPKM Darurat. Dimana syarat perjalanan udara dalam negeri menuju dan dari Jawa serta Bali harus menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil tes PCR. **(Awh)-d**

Taati Aturan Agar PPKM Darurat Tak Sia-sia

JAKARTA (KR) - Pemerintah meminta masyarakat untuk menaati segala peraturan agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak sia-sia, sehingga upaya penanganan lonjakan Covid-19 dapat segera tertangani.

"Dimohon kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menaati peraturan selama PPKM Darurat, agar PPKM Darurat ini tidak sia-sia," tandas Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito secara virtual, di Jakarta, Selasa (6/7).

Wiku Adisasmito menyatakan, diperkirakan dalam beberapa hari ke depan kasus penularan Covid-19 akan terus naik sebelum efek dari pelaksanaan PPKM Darurat kelihatan. Karena itu, masyarakat diminta terus mempertebal keamanan dan keselamatan jiwanya, termasuk mengikuti segala arahan dari Pemerintah soal penanganan Covid-19. Dimohon juga sektor swasta nonesensial supaya mematuhi peraturan dan tidak memaksakan pegawainya bekerja di kantor.

Kepada Pemerintah Daerah, Wiku berharap semua kepala daerah benar-benar menegakkan PPKM Darurat sesuai yang tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, Pemerintah kini sedang menyiapkan Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 dengan kapasitas 950 tempat tidur. "Mudah-mudahan itu bisa beres dalam dua hari ke depan, sehingga 900 tempat tidur baru bisa kita buka. Ditambah ada 50 tempat tidur ICU bekerja sama dengan Kementerian BUMN, terima kasih kepada Pak Erick Thohir, juga di Wisma Haji kita akan persiapkan," ujarnya.

Menkes memaparkan, Pemerintah menambahkan kapasitas Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet dan membuka tempat isolasi terpusat lainnya di Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput. "Dengan demikian bisa kita tampung untuk masuk ke tempat tidur isolasi terpusat atau juga ke tempat tidur rumah sakit. Tempat tidur isolasi terpusat ada sekitar 7.000-an, sedangkan tempat tidur rumah sakit ada tambahan 950-an," paparnya. **(Sim/San)-d**

LONJAKAN COVID-19 DI JATENG

Vaksinasi Karyawan Pabrik Dipercepat

SEMARANG (KR) - Lonjakan Covid-19 di Kabupaten Pati diantisipasi dengan vaksinasi secara massal. Hal ini juga dilakukan di Pabrik Garudafood Pati.

Mulai Selasa (6/7) hingga Rabu (7/7) ini vaksinasi akan dituntaskan untuk 3.000 karyawan dan buruh pabrik Garudafood.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) bekerja sama dengan Kodam IV Diponegoro dan Forkopimda Pati (Bupati, Wakil Bupati Pati, Kapolres Pati, Kejari pati, DPRD Pati, Sekda Pati dan Dinas Kesehatan) menggelar kegiatan vaksinasi massal untuk seluruh karyawan pabriknya di Pati, Jawa Tengah dengan tema "Serbuan Vaksinasi Kabupaten Pati, Semangat Garudafood untuk Indonesia Lebih Sehat".

KR-Chandra AN

Bupati Pati Haryanto didampingi Head of Manufacturing Garudafood Awan Susila, Factory Manager Augustinus Winardi, dan Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham Zamrani meninjau kesiapan vaksin.

"Vaksinasi massal ini diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan target vaksinasi sebanyak 3.000 karyawan Garudafood. Melalui kegiatan ini, Garudafood mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan herd immunity serta mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia," ungkap Awan Susila, Head of Manufacturing Garudafood.

"Kegiatan ini diselenggarakan demi keselamatan bersama, khususnya karyawan kami," ujar Awan Susila, Head of Manufacturing Garudafood.

Bupati Pati H Haryanto yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Pati meninjau langsung pelaksanaan Serbuan Vaksin terhadap 3.000 karyawan dan buruh Garudafood.

"Percepatan vaksinasi pada kategori dengan wilayah zona merah atau daerah dengan penularan Covid-19 tinggi merupakan salah satu upaya kami dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya di area Pati. Oleh karena ini, kami menggandeng seluruh pihak salah satunya industri untuk terlibat," ujarnya. **(Cha/Cuk)-d**

RAPBN 2022 Didesain Fleksibel

JAKARTA (KR) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2022 harus dirancang responsif, fleksibel, dan adaptif. Pasalnya kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah perlu merancang RAPBN yang responsif, fleksibel, dan adaptif. Namun tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan akuntabel," kata Puan, usai menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR RI ke-22, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/7).

Puan menegaskan, keselamatan masyarakat adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI. Karena itu, kata Puan, DPR RI mendukung dan mengawasi penuh seluruh langkah serta kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. "Dalam kerangka itulah RAPBN disusun oleh DPR bersama pemerintah. DPR concern terhadap keselamatan warga. Namun kita juga harus meyiapkan diri untuk memulihkan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi," kata Puan.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu berharap pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan RAPBN dan RKP Tahun 2022 untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat Covid-19. Selain itu, pemerintah diminta bekerja lebih efektif dan efisien di tengah ketidakpastian akibat pandemi tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat paling terdampak dan yang membutuhkan bantuan pada masa pandemi. "Belanja kementerian dan lembaga harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Secara umum, bagaimana APBN 2022 bisa memulihkan ekonomi dan tentu saja kesejahteraan masyarakat," katanya lagi.

Untuk diketahui agenda Rapat Paripurna adalah Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Sebelumnya, sesuai UU MD3, pemerintah telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2022 pada Rapat Paripurna 20 Mei 2021 dan ditanggapi fraksi-fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna 25 Mei 2021.

Berdasarkan UU MD3 dan Tatib DPR RI, Badan Anggaran bertugas melakukan Pembahasan Pendahuluan RAPBN paling lambat bulan Juli. Badan Anggaran telah melakukan pembahasan sejak 31 Mei ñ 30 Juni 2021 bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI.

Dalam pembahasan itu, Komisi VII dan XI telah menyampaikan rekomendasi asumsi dasar 2022, Pagu Indikatif dan RKP 2022 berdasarkan pembahasan dengan mitra-mitra kerjanya. Pembahasan kemudian dipertajam dalam 4 Panja yang dibentuk untuk membahas RAPBN 2022. **(Sim)-d**

Kritis, ... Sambungan hal 1

Hal itu untuk mencegah agar tidak muncul klaster keluarga," urainya.

DPRD DIY meminta Pemda untuk memfasilitasi masyarakat yang terpaksa harus melakukan isolasi mandiri (isoman) karena positif Covid-19. Jumlah kasus yang meningkat, ditambah hampir penuhnya kapasitas rumah sakit dan ruang perawatan menjadi alasan dewan mendorong untuk mengawasi dengan detail warga yang isoman di rumah. "Ada konsekuensi dari adanya kebijakan PPKM Darurat ini. Ada beberapa hal yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Sampai saat ini kami belum melihat langkah nyata Pemda DIY mengenai hal tersebut. Salah satunya memfasilitasi warga yang isoman di rumah," jelasnya.

Nuryadi menegaskan jika dia tidak bermaksud mencari siapa yang salah. Melainkan bagaimana mencari solusi terbaik dalam menghadapi situasi ini. Sebab, banyak warga yang terpaksa isoman karena sulit mengakses shelter maupun rumah sakit.

"Kami mendorong agar situasi ini lekas mendapatkan solusi. Pasalnya, kini di masyarakat muncul kesan saling lempar tanggung jawab antara Pemda DIY, Pemkot/Pemkab dan Pemdes untuk mengampu warga yang kesulitan saat harus isoman," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih di Yogyakarta, Selasa (6/7) mengemukakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah menyediakan 59 shelter yang dapat diakses masyarakat DIY yang ingin melakukan isolasi akibat terjangkit Covid-19. Shelter-shelter ini tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.Sebanyak 59 shelter isolasi tersebut diperuntukkan bagi pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan mereka yang bergejala ringan. Shelter itu sudah mulai aktif sejak 1 Juli. Bahkan dari jumlah tersebut tercatat sudah ada 14 shelter yang terisi dengan jumlah 211 pasien.

"Sebetulnya untuk pengoperasian 59 shelter sudah dimulai sejak 1 Juli 2021. Adapun untuk kapasitas, tiap shelter memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Namun total kapasitas dari 59 shelter tersebut sebanyak 856 orang. Shelter tersebut sengaja kami siapkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan penambahan positif Covid-19. Namun shelter ini dikhususkan bagi pasien positif Covid-19 yang bergejala ringan," katanya. **(Awh/Bro/Ria/Ira)-f**

Christensen . . . . . Sambungan hal 1

Ia sangat besar, jadi sulit untuk bermain fisik melawannya, tetapi ia juga memiliki kualitas yang hebat dengan kakinya, jadi Anda juga tidak boleh terlalu dekat," ujarnya.

Meski bermain untuk klub-klub yang tidak terlalu ternama di seluruh Eropa, para pemain Denmark tidak terintimidasi oleh deretan skuad Inggris yang bertabur bintang.

"Saya merasa kami memiliki kualitas untuk bermain melawan semua orang. Sebagai sebuah tim, saya tidak akan mengatakan bahwa mereka jauh lebih baik," kata Christensen.

Menurutnya, Denmark akan kalah jumlah, tetapi kami senang dan kami berusaha untuk setenang mungkin.

"Kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki kualitas untuk bermain melawan yang terbaik. Ini tentang siapa yang paling menginginkannya," tutupnya. **(Ant)-d**